

Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si.



# KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN

SERI 2



# KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN

SERI 2

Tidak seperti ilmu-ilmu sosial yang lain, sampai dengan dekade 1990-an, ilmu pemerintahan di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis dan identitas. Namun begitu, sebagai satu solusi awal dari problema ini diajukan konstataasi bahwa objek formal dari ilmu pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan satu "field" atau bagian dari ilmu politik, seperti halnya ilmu administrasi negara, hubungan internasional dan yang lainnya.

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal perkembangan ilmu pemerintahan di UGM yang sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa ilmu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang menyangkut politik pengambilan keputusan dalam negara (the politics of policy making). Kedua, pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri (policy execution). Dengan kata lain, ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu politik. Pandangan ini selaras dengan realita terjadinya kesamaan posisi antara ilmu politik dan pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan tidak lagi menjadi bagian dari ilmu politik seperti yang berlaku sebelumnya.

Dari pemahaman posisi itu, sasaran utama dan objek formal dari ilmu pemerintahan dengan sendirinya adalah pemerintahan Indonesia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dalam studi pemerintahan bisa dibahas masalah eksekutif, baik pada tingkat "presidency" maupun pada tingkat lokal. Demikian juga bisa dikaji persoalan "legislatures" terutama yang berkaitan dengan sejarah, kedudukan, fungsi serta peranan lembaga tersebut. Pemahaman terhadap lembaga MA, MPR, TNI, masalah kepartaian dan pemilu, perilaku politik, sosialisasi politik, politik pembuatan kebijakan, analisis dan implementasi serta evaluasi kebijakan yang ditempuh. Jadi, ruang lingkup ilmu pemerintahan adalah "hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama".

**KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN  
SERI 2**

**Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN  
SERI 2**

**Penulis** : Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Abdina Khaeru Sabila

**ISBN** : 978-623-5382-99-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Buku **Kapita Selekta Pemerintahan Seri 2** ini merupakan kelanjutan dari buku **Kapita Selekta Pemerintahan Seri 1** yang sudah terbit sebelumnya. Buku ini mengkaji fenomena aktual mengenai aspek-aspek Ilmu Pemerintahan. Beberapa masalah yang dibahas antara lain budaya politik pemerintahan, demokrasi dan *governance*, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, nasionalisme dan kondisi keberagaman, partai politik dan pemilihan umum, patologi biokrasi dan maladministrasi, politik dan moralitas, strategi budaya dan multikulturalisme, reaktualisasi nilai-nilai demokrasi, reformasi birokrasi pelayanan publik dan urgensi aspirasi rakyat.

Seperti diketahui sampai dengan dekade 1990-an, ilmu pemerintahan di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis dan identitas. Namun begitu, sebagai satu solusi awal dari problema ini diajukan konstataasi bahwa objek formal dari ilmu pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan satu "field" atau bagian dari ilmu politik, seperti halnya ilmu administrasi negara, hubungan internasional dan yang lainnya.

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal perkembangan ilmu pemerintahan di UGM yang sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa ilmu pemerintahan berhubungan dengan: *pertama*, kegiatan yang menyangkut politik pengambilan keputusan dalam negara (*the politics of policy making*). *Kedua*, pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri (*policy execution*). Dengan kata lain, ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu politik. Pandangan ini selaras dengan realita terjadinya kesamaan posisi antara ilmu politik dan pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan tidak lagi menjadi bagian dari ilmu politik seperti yang berlaku sebelumnya.

Dari pemahaman posisi itu, sasaran utama dan objek formal dari ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas dalam

buku ini adalah fenomena pemerintahan Indonesia yang terseleksi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Buku ini tidak mungkin akan bisa diwujudkan seperti sekarang tanpa adanya kontribusi dan dorongan dari berbagai pihak. Istri penulis Trisna Yudhani serta ananda Chitta dan Rayendra ikut memberikan kesempatan dan merelakan waktu bagi penulisan buku ini yang semestinya untuk keluarga. Kepada mereka buku ini dipersembahkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Akhirnya, walaupun pasti masih banyak kekurangan tetapi penulis tetap berharap semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Denpasar, 8 Juni 2022

I Wayan Gede Suacana

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 BUDAYA POLITIK PEMERINTAH .....	1
A. Budaya Korupsi dalam Pemerintahan.....	1
B. Pematangan Budaya Politik dan Demokratisasi.....	6
C. Budaya Politik Massa Parpol dalam Kampanye.....	10
BAB 2 DEMOKRASI DAN GOVERNANCE.....	16
A. <i>Democratic Governance</i> Pasca Amandemen UU Otonomi Daerah.....	16
B. Memaknai Pembangunan Politik dan Demokratisasi ....	21
C. Demokrasi, Pilkada dan Kemandirian Politik Rakyat....	26
D. Hibridisasi dan Defisit Demokrasi dalam Pilkada Bali..	29
BAB 3 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH.....	52
A. Harmonisasi Hubungan Pusat dengan Daerah .....	52
B. Dilema Otonomi Khusus Bali .....	55
C. Resentralisasi Penerimaan CPNS? .....	58
BAB 4 NASIONALISME DAN KONDISI KEBERAGAMAN.....	63
A. Nasionalisme di Kancah Infantilisme Politik.....	63
B. Kohesi Nasional dalam Bayangan Etno-Nasionalisme ..	67
C. Pilkada dengan Landasan Multikulturisme.....	72
BAB 5 PARTAI POLITIK DAN PEMERINTAH UMUM .....	76
A. Parpol: Antara Pragmatisme dan Idealisme .....	76
B. Pemilu dan Pembentukan Masyarakat Madani.....	79
C. Pemilu 2004: Penguatan Demokrasi dan <i>Civil Society</i> ? ..	83
D. Problema Perwakilan dan Kualitas Caleg Pascapemilu Legislatif .....	89
BAB 6 PATOLOGI BIROKRASI DAN MALADMINISTRASI.....	96
A. Kasus APBD dan Pembenahan Fungsi-fungsi Parpol...	96
B. Mencermati Repolitisasi Birokrasi .....	100
C. Meritokrasi dalam Penerimaan CPNS, Quo Vadis? .....	104
BAB 7 POLITIK DAN MORALITAS.....	109
A. Bangkit dari Krisis Nilai-nilai Kemanusiaan.....	109
B. Kapabilitas Regulatif dan Etika Politik.....	113

C.	Moralitas dan Profesionalisme Legislator.....	118
BAB 8	STRATEGI BUDAYA DALAM MULTIKULTURALISME .....	123
A.	Problema Sosial Masyarakat Multikultural .....	123
B.	Strategi Budaya dalam Otonomi Daerah .....	127
BAB 9	REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI .....	132
A.	Mengajari Anak Berdemokrasi .....	132
B.	Nilai-nilai Demokrasi dalam Kebudayaan Bali .....	137
BAB 10	REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.....	164
A.	Kemana Arah Reformasi Birokrasi Kita? .....	164
B.	Melacak Gejala Patologi dalam Birokrasi .....	170
C.	Menjaga Citra Birokrasi sebagai Agen Pelayanan Publik .....	174
BAB 11	URGENSI ASPIRASI RAKYAT .....	179
A.	Mencermati Orientasi Politik Pemilih Pemula .....	179
B.	Belajar Mendengarkan dan Menerima Kritik Rakyat ...	182
C.	Pilpres dan Kemandirian Politik Rakyat.....	186
D.	Seandainya Saya Bupati Badung .....	191
DAFTAR PUSTAKA	.....	197
TENTANG PENULIS	.....	205



# BAB 1

## BUDAYA POLITIK PEMERINTAHAN

*The test of courage comes when we are in the minority,  
the test of tolerance comes when we are in the majority*

(Ralph W. Sockman)

### A. Budaya Korupsi dalam Pemerintahan

Berbagai kasus korupsi yang kembali marak akhir-akhir ini lebih merupakan “produk” lama dengan kemasan baru. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa korupsi sudah menjadi—meminjam istilah Bung Hatta, “kebudayaan” para penguasa. Budaya korupsi tersebut jelas merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan dan perampasan hak-hak rakyat. Berbagai upaya: sistemik, abolisionistik dan moralistik mesti dilakukan, untuk setidaknya-tidaknya tetap menjaga *ajeg-nya* kepercayaan publik yang diemban.

Rumusan klasik Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* sudah sangat populer di kalangan ilmuwan pemerintahan (*government scientists*). Idiom ini mengingatkan betapa sebuah kekuasaan sangat rentan terhadap penyelewengan. Kita terlanjur percaya dengan tesis Acton, yang dalam praktek harus diakui belum ada negasinya.

Keinginan serta obsesi untuk mewujudkan sebuah *clean government* dan *good governance* tentu masih ada. Walau kenyataan menunjukkan, pelaku-pelaku korupsi justru kebanyakan adalah birokrat dan legislator—kelompok yang semestinya mengayomi rakyat--yang tersebar pada berbagai

# BAB 2

## DEMOKRASI DAN GOVERNANCE

*Demokrasi adalah para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa*

*dapat diberikan suara*

(Samuel P. Huntington)

### **A. *Democratic Governance* Pasca Amandemen UU Otonomi Daerah**

Peluang untuk memperkuat *democratic governance* di Indonesia semakin terbuka lebar seiring pengesahan RUU tentang Perubahan UU Otonomi Daerah dalam Rapat Paripurana DPR, Rabu 29 September 2004. Dengan perubahan ini, pemilihan kepala daerah—seperti halnya pemilihan presiden lalu, dapat dilakukan secara langsung. Setidaknya, mulai bulan Juni 2005 nanti rakyat kembali dapat memilih secara langsung gubernur dan bupati/ walikota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis hingga kurun waktu itu.

Setelah dibahas secara maraton, akhirnya RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU Perubahan UU Otonomi Daerah) disetujui dan disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR. Kedua UU yang disahkan tersebut masing-

# BAB 3

## HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

*Bagaimanapun cakupnya seseorang, dia tidak akan dapat menarik garis batas yang tegas antara tugas dan kekuasaan pemerintah pusat dengan tugas serta kekuasaan pemerintah daerah*  
(Wihelm von Humboldt)

### A. Harmonisasi Hubungan Pusat dengan Daerah

Harus disadari, sebagaimana kata Wihelm von Humboldt, sangat sulit menarik garis pembatas yang tegas antara tugas dan kekuasaan pusat-daerah. Relasi yang tercipta diantara keduanya mesti ditempatkan dalam konteks negara kesatuan, dimana *pusat* merupakan *pusatnya daerah*, *daerah* menjadi *daerahnya pusat*. Supaya relasi pusat-daerah tersebut tetap harmonis, dan perluasan otonomi daerah dapat tetap terajut dalam kohesi nasional, otonomi semestinya lebih dimaknai sebagai heteronomi dengan semangat multikulturalisme.

Praktek demokrasi yang berimplikasi pada implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang sangat luas dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Ketidakharmisan relasi pusat-daerah yang dimanifestasikan dengan gerakan menuntut kemerdekaan di beberapa daerah membuat bahkan ide demokratisasi sudah tidak relevan lagi karena merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara kesatuan kita.

Sentimen primordialisme yang kerap dimanfaatkan sebagai dasar tuntutan kepada pusat mengindikasikan belum

# BAB 4

## NASIONALISME DAN KONDISI KEBERAGAMAN

*Apa yang sudah disepakati secara politik,  
jangan pernah diperdebatkan secara estetis*  
(Soekarno)

### A. Nasionalisme di Kancah Infantilisme Politik

Perkembangan nasionalisme adalah proses sejarah yang dapat dilihat. Ia terjadi di beberapa negeri tertentu, ia terjadi menurut cara tertentu, dan ia menimbulkan suatu suasana tertentu, yang berwujud di dalam ideal nasional. Apa yang pasti ialah bahwa dalam abad ke-20, nasionalisme, hasil sejarah dari badan-badan politik tertentu, fakta-fakat geografis, dan perkembangan ekonomi di Eropa Barat, telah tersebar ke seluruh dunia dan menjadi pengungkit perubahan yang terbesar di masa kini (Barbara Ward).

Bangsa Indonesia baru saja memasuki momentum baru dalam rotasi kepemimpinan nasional dengan pelantikan presiden dan kabinet baru. Selaksa harapan diberikan kepada presiden SBY dan wapres JK, agar dengan kabinet baru yang telah dibentuk dapat membawa bangsa ini segera keluar dari krisis. Namun demikian, pasca penyelenggaraan Pemilu yang dipenuhi suasana kompetisi, pertama-tama--sepertinya kita harus memperkuat (kembali) kohesivitas solidaritas dan nasionalisme sebagai dasar kesatuan bangsa. Hal ini penting karena *infantilisme politik* yakni tidak tercapainya sifat kedewasaan dalam sikap dan perilaku politik, alias—meminjam istilah Taufik Kiemas, politik “kekanak-kanakan”,

# BAB 5

## PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

*Politikus berpikir tentang pemilihan berikutnya,  
negarawan tentang generasi yang akan datang  
(James Freeman Clarke)*

### A. Parpol: Antara Pragmatisme dan Idealisme

kegamangan aturan pengajuan calon pejabat publik yang berimbas pada keraguan parpol untuk dapat berkompetisi dalam pilgub 2008 di bali menimbulkan tanda tanya di tengah transisi regulasi tentang parpol dan pemilu. lalu, bagaimana masalah ini bila dicermati dari sisi pragmatisme dan idealisme parpol ?

salah satu fungsi parpol adalah mengadakan rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. dalam menjalankan fungsi itu, parpol menyeleksi berdasar bakat dan kriteria tertentu para anggota atau masyarakat umum untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin

Dalam iklim kehidupan demokrasi, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menjadi anggota parpol dan seligus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam pencalonan sebagai pejabat publik. mereka yang mempunyai kemampuan menonjol (bukan faktor uang atau *money politics*) memiliki peluang lebih besar dipilih sebagai calon pemimpin dibandingkan dengan yang lainnya. menjadikan uang sebagai syarat utama dalam pencalonan jelas mengingkari prinsip demokrasi dan etika politik, sekaligus memperlihatkan masih

# BAB 6

## PATOLOGI BIROKRASI DAN MALADMINISTRASI

*Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukan kehancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintahan yang baik*  
(Thomas Jefferson)

### A. Kasus APBD dan Pembentukan Fungsi-fungsi Parpol

Berbagai kasus penyimpangan APBD yang mengemuka di beberapa daerah menyiratkan adanya permasalahan dalam kinerja legislatif selama ini. Pimpinan legislatif ternyata tidak mampu mengontrol jalannya roda pemerintahan karena perilakunya sendiri yang tidak terkontrol. Dalam kondisi seperti itu, bagaimanakah eksistensi partai politik (parpol) sebagai komponen penting infrastruktur politik yang membidani kelahiran kaum legislator yang diduga terlibat ? Bagaimanakah cara melaksanakan fungsi-fungsi parpol agar bisa berjalan (kembali) secara optimal ?

Dalam pembangunan politik bangsa dibutuhkan tidak hanya suprastruktur tetapi juga infrastruktur politik yang memadai. Partai politik sebagai organisasi politik resmi dan merupakan bagian infrastruktur politik memiliki beberapa fungsi yang sangat strategis untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan legislatif.

Sayangnya, setelah para anggotanya menduduki jabatan legislatif fungsi-fungsi tersebut belum juga terlaksana hingga kini. Di beberapa daerah, elite-elite partai yang

# BAB 7

## POLITIK DAN MORALITAS

*Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut*  
(C.F. Strong)

### A. Bangkit dari Krisis Nilai-nilai Kemanusiaan

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2005 mencerminkan sudah semakin pudarnya nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa ini. Kecenderungan penggunaan cara-cara kekerasan itu, apapun bentuknya sesungguhnya semakin menjauhkan kita dari arena dialogis yang mutual, inklusivitas sebagai syarat kehidupan masyarakat kita yang bhinneka dan multikultural. Lalu, masih adakah peluang untuk bisa bangkit kembali dari krisis nilai-nilai kemanusiaan itu?

Apabila dilihat rentang perjalanan bangsa ini di sepanjang tahun 2005, akan segera tampak penggunaan cara-cara kekerasan yang masih sangat dominan. Hal itu tampak dari aneka bentuk tindakan kriminal dalam kehidupan sehari-hari, bentrok antar warga, penghancuran kantor parpol, media massa, pemerintah oleh warga masyarakat, konflik yang berlatar belakang SARA, serta aksi terorisme lewat beberapa kali peristiwa pengeboman.

Mungkin para pelaku tindak kekerasan tersebut belum menyadari, seperti kata Leo Tolstoy bahwa sebagian besar kejahatan yang menimpa umat manusia adalah karena

# BAB 8

## STRATEGI BUDAYA DALAM MULTIKULTURALISME

*Demokrasi sejatinya adalah pelayanan oleh penyelenggara negara  
untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan sebaliknya*

(I Wayan Gede Suacana)

### **A. Problema Sosial Masyarakat Multikultural**

Kondisi masyarakat multikultural ternyata tidak selamanya kondusif bagi pengembangan toleransi dan demokrasi. Pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya yang cukup tinggi berpotensi memunculkan berbagai jenis konflik baru—seperti dalam kasus Ambon sekarang. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa upaya mengaktualisasikan nilai-nilai bersama dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Manifestasi empiris penurunan rasa aman dan damai masyarakat akhir-akhir ini terlihat semakin nyata dan transparan. Munculnya berbagai tindak kekerasan, terorisme dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah--terakhir dengan mencuatnya kembali kasus Ambon, merupakan sebagian parameter yang memperkuat gejala tersebut. Bersamaan dengan itu semakin mudah ditemukan fenomena homeless, dimana hampir semua persoalan kebanyakan berkisar pada perbedaan etnis, ideologi politik dan dogmatisme agama.

Berbagai lembaga negara serta pranata sosial yang ada seakan mengalami stagnasi dan krisis legitimasi, karena tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara normal. Dialog



# BAB 9

## REAKTUALISASI NILAI- NILAI DEMOKRASI

*Demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik*  
(Hannry B. Mayo)

### A. Mengajari Anak Berdemokrasi

Sosialisasi demokrasi pada anak adalah proses yang memungkinkan bagi seorang anak memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap demokratisnya menghadapi segala perbedaan dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, mengajari anak berdemokrasi berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah makhluk bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar bertumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak.

Ada fenomena menarik yang layak dicermati tentang kehidupan berdemokrasi para pemimpin kita akhir-akhir ini. Perilaku para elite politik\_setidaknya sebagaimana dipertunjukkan oleh para anggota dewan yang terhormat\_penuh dengan keributan berebut kata dan kuasa, jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi. Demokrasi, yang sering diplesetkan menjadi 'democracy' sepenuhnya adalah wacana tentang jawaban yang didesakkan layaknya sebuah dogma. Mereka tidak lagi bisa berdialog dan

# BAB 10

## REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

*Demokrasi mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat*  
(Prof. Mr. Muhamad Yamin)

### A. Kemana Arah Reformasi Birokrasi Kita?

Gerakan reformasi, termasuk didalamnya reformasi birokrasi sudah berlangsung lebih dari empat tahun terhitung sejak Mei 1998 lalu. Namun, tampaknya sampai saat sekarang belum banyak perubahan signifikan dalam “performance” birokrasi, kendati kita sudah melakukan setidaknya tiga kali pergantian jabatan Presiden. Bahkan, beberapa waktu lalu, MPR memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini dalam sub bidang “reformasi birokrasi” yang merupakan hasil pembahasan MPR terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan 2002. Pada bagian tersebut dikatakan bahwa kultur birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sering merugikan dan bahkan menjadi beban masyarakat dan negara. Untuk itu direkomendasikan agar Presiden Megawati membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat.

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang sudah ada sejak jaman dulu. Birokrasi kerap muncul

# BAB 11

## URGENSI ASPIRASI RAKYAT

*Sebagai salah satu instrumen komunikasi politik, kritik memang menduduki tempat yang penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat pemerintah sebagai abdi negara semestinya belajar lebih banyak mendengarkan suara rakyat. Penyakit alergi setiap mendengar dan menuai kritik rakyat sesungguhnya mengingkari bentuk kedaulatan rakyat. Mereka terjebak dalam “kebenaran” subjektif dengan menganggap negara sebagai miliknya sendiri (le tat ces moi) dan melupakan kebenaran dan eksistensi rakyat*

(Amartya Sen)

### **A. Mencermati Orientasi Politik Pemilih Pemula**

Pemilu 2004 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah siap digelar. Ritual politik yang kesepuluh dalam perspektif diakronik kehidupan politik negara kita akan diselenggarakan dua hari lagi, yakni pada 5 April 2004 untuk memilih anggota legislatif dan DPD, sedangkan pada 5 Juli dan 20 September untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu sesungguhnya merupakan tradisi politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik, walau disadari betul partisipasi rakyat secara penuh dalam seluruh proses politik mustahil dilakukan pada masa sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben, 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (penerjemah Nurhadi), Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A., *Comparative Political Systems*, dalam dalam Macridis and Brown, 1977. *Comparative Politics: Notes and Reading*, The Dorsey Press.
- \_\_\_\_\_, dan Verba, Sidney, 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Anderson, Benedict R.O'G, *The Idea of Power in Javanese Culture* dalam Holt, Claire (ed), 1972. *Culture and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Antlov, Hans, "Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework, *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vo. 39, No. 2, 2003 hlm. 193-214
- Ardana, I Ketut (ed), 2020, *Pemetaan Tipologi dan Karakteristi Desa Adat di Bali*, Cakra Media Utama Denpasar
- Azhari dan Idham Ibtly dkk. 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)*, PKPEK dan FORKOMA-MAP, UGM, Yogyakarta.
- Bahm, Archie J., 1980. What is "Science"? dalam *My Axiology: The Science of Values*, 44-49 World Books, Albuquerque, New Mexico.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Filsafat Perbandingan: Filsafat Barat, India, Cina dalam Perbandingan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Baker, Anton, 1992. *Ontologi Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-dasar Kenyataan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Barker, Chris, 2000, *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Blau, Peter M. (ed), 1975. *Approach to Study of Social Structure*, The Free Press, New York.
- Berg, Bruce L. 1989. *Qualitative Research Methodes for the Social Sciences*, Indiana University of Pennsylvania, Boston.

Zoelva, Hamdan, Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah, dalam  
<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-kepala-daerah/> diakses tanggal 12 Mei 2008.

2005, Peran Gender dalam Kehidupan Masyarakat Adat Bali, Kerjasama Pemprov Bali dengan Pusat Studi Perempuan Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA Edisi 1 Volume 1, 1999 tentang MASYARAKAT SIPIL

Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA Edisi 21 Tahun VI, 2005 tentang PILKADAL

## TENTANG PENULIS



**I Wayan Gede Suacana**, lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen dan peneliti Prodi S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Warmadewa dengan bidang peminatan keilmuan: *Local Governance*, Budaya Organisasi, Manajemen Publik, dan Demokrasi. Tamat SMAN 3 Denpasar (1985), S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1990), S2 Administrasi Publik UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya UNUD (2008). Kini sebagai Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Warmadewa, Ketua Yayasan Dvipantara Samskrtam.

Peminat Hatha Yoga, Meditasi dan *Wirama Kakawin* ini beberapa kali mendapatkan Hibah Multitahun Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Ditjen Dikti Ristek, yang lurannya dipublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal bereputasi internasional.

Beberapa buku ber-ISBN telah diterbitkan antara lain: *Budaya Demokrasi dalam Pemerintahan Desa di Bali*, Penerbit WADE Group, 2016; *Model Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Penerbit Qiara Media Partner, 2019; *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris bagi Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penerbit Qiara Media Partner, 2020; *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*, Penerbit Qiara Media Partner, 2020; *Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali*, Penerbit Literasi Nusantara, 2021 dan *Kapita Selektta Pemerintahan Seri-1*, Penerbit Literasi Nusantara, 2022. *Meditasi: Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan*, Penerbit CV

Eureka Media Aksara, 2022. *Kapita Selekta Pemerintahan Seri-2* Penerbit CV Eureka Media Aksara, 2022.

Dua artikel terakhirnya, yaitu: 1) *Strategy for Development for Development of Eco-Tourism Policy Based on Local Wisdom of Indigenous Communities in Ubud Bali Indonesia* dipublikasikan dalam *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 2022, Vol. 6, No. 1, 2608 – 2618 Terindeks Scopus-Q1 SJR 0.72 beralamat Resat Bey Mahallesi, Ataturk Caddesi Mimar Semih Rustem Is Merkezi No:18 Kat:8-9, Seyhan, Adana / Turkiye dengan tautan <https://journalppw.com/index.php/jppw/article/view/3234>.

2) *Local Wisdom Tri Hita Karana and Based on Indigenous Communities in Bali* dipublikasikan dalam *Budapest International Research and Criics Institute (BIRCI-Journal): Humanities*, Vol 5, No. 2, May 2022, 10331-10342 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN: 2615-1715 (Print). Terindeks SINTA-3 dengan tautan <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4832>

Delapan buah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa Hak Cipta Buku dan Artikel telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Ayah dua orang anak dan kakek seorang cucu ini adalah Pengelola Pondok *Prema, Satya & Sai Amrita* Ubud. Prinsip hidupnya: *Unity, Purity, Divinity*. Alamat e-mail dan nomor WA yang dapat dihubungi: [suacana@gmail.com](mailto:suacana@gmail.com) dan 089637979171